

PENGEMBANGAN JABAR CYBER PROVINCE SEBAGAI MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Syarif Budhirianto

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Bandung

Jln. Pajajaran No. 88 Bandung 40173 Telp. (022) 6017493 Fax. (022) 6021740

Hp. 08122393677. E-mail: syarifbudhi@gmail.com

Naskah diterima tanggal 12 Oktober 2013, direvisi tanggal 21 Mei 2014, disetujui tanggal 4 Juni 2014

DEVELOPMENT OF JABAR CYBER PROVINCE AS A MEDIA OF INFORMATION AND COMMUNICATION

Abstract

Jabar Cyber Province (JCP) is a flagship program of Government of West Java Province in implementation of Information and Communication Technology (ICT) to improve coordination, communication and collaboration of local government administration. To establish the program, the Government of Sukabumi City has developed public services at all levels in every work units, so that the people can feel its benefits optimally. The focus of this research is to discover how the development in establishing JCP as a medium of information and communication among work units, as well as decision in applying information transparency to the public. This research is descriptive using qualitative approach, the data obtained through observation and interviews with officials in the Office of Communications and Informatics of Sukabumi City. The results show that the development of ICT in establishing JCP in Government of Sukabumi City has not implemented optimally, while the information transparency is done through the stages of stakeholders towards aggregation of the public interests.

Keywords: *development , Cyber Province of West Java , media information.*

Abstrak

Jabar Cyber Province (JCP) merupakan program unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna meningkatkan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk mewujudkan program tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi telah mengembangkan pelayanan publik di semua level satuan kerjanya, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara optimal. Adapun fokus penelitian ini adalah bagaimana pengembangannya dalam mewujudkan JCP sebagai media informasi dan komunikasi antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta kebijakan dalam mengaplikasikan transparansi informasi kepada masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan para pejabat di lingkungan Kantor Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi. Hasil penelitian menunjukkan pengembangan TIK dalam mewujudkan JCP di Pemkot Sukabumi belum optimal dilaksanakan, sedangkan pada aspek transparansi informasi dilakukan melalui tahapan-tahapan dari pemangku kepentingan menuju agregasi kepentingan masyarakat.

Kata kunci: *pengembangan, Jabar Cyber Province, media informasi.*

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan program *Jabar Cyber Province* (JCP) diperlukan koneksi jaringan yang terintegrasi seluruh kegiatan di lingkungan pemerintahan hingga ke tingkat kecamatan sehingga saling terhubung secara *online*. Salah satu tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan pemerintahan yang baik (*good government*), dengan mengoptimalkan media *online* sebagai media informasi dan komunikasi. Bidang ini menjadi prioritas pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menata pemerintahan di 26 kabupaten dan kota, 620 kecamatan, dan 5.810 desa/kelurahan, di mana dari jumlah itu perlu penataan secara komprehensif kualitas TIK

Pemanfaatan TIK pada sektor ekonomi juga penting, karena sektor ini memiliki efek ganda dan dapat menggerakkan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat yakni dengan memberikan layanan informasi dan interaksi, seperti reservasi *online* (hotel, paket, wisata, transportasi, dan sebagainya), sistem pembayaran *online*, pengelolaan *database* pariwisata daerah, proses interaksi, dan transaksi lainnya.

Pemerintah Kota Sukabumi yang mengusung konsep Sukabumi *Cyber City* telah mengembangkan program JCP dalam bidang pelayanan publik kepada masyarakat, bahkan kepengelolaan yang dilakukan oleh Kantor Infokom, Pusat Data Elektronik (PDE), dan Arsip Daerah Kota Sukabumi telah memanfaatkan berbagai sistem informasi yang berbasis TIK kepada beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian yang dikaji adalah bagaimana pengembangan TIK dalam mewujudkan JCP sebagai media komunikasi pada Pemkot Sukabumi, dengan identifikasi: (1) Bagaimana pengembangan TIK di Pemkot Sukabumi sebagai media komunikasi dan informasi antarSKPD, berdasarkan program JCP yang telah berjalan; (2) Bagaimana kebijakan pengembangan JCP dalam mengaplikasikan transparansi informasi kepada masyarakat; (3) Bagaimana kebijakan pengembangan sumber daya manusia (SDM)

aparatur pemerintah dalam mendukung program JCP.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengembangan TIK di Pemkot Sukabumi sebagai media informasi dan komunikasi sesuai dengan konsep JCP yang mengoptimalkan pemanfaatan konten dan meningkatkan kualitas layanan publik, serta mengetahui kebijakan pengembangannya dalam rangka mengaplikasikan transparansi informasi kepada masyarakat, sedangkan kegunaan penelitian ini: untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten dan kota dapat memantau kinerja SKPD masing-masing melalui jaringan *online* secara integratif dan komprehensif, sehingga aspek komunikasi dan informasi dapat berlangsung secara terbuka, masyarakat dengan mudah mengakses data dan profil di seluruh Kabupaten Sukabumi yang dibutuhkan; serta berguna bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui Direktorat Jendral Aptika dalam menyusun kebijakan program pengembangan teknologi komunikasi dan informatika di seluruh instansi pemerintah, sehingga masyarakat siap menyongsong era masyarakat informasi pada tahun 2015 yang akan datang.

LANDASAN KONSEP

Dalam memberikan pengayaan ilmiah tentang pengembangan TIK dalam mewujudkan JCP sebagai media komunikasi, dipandang perlu merujuk dan mengkaji hasil penelitian terdahulu yang sejenis, artinya yang memiliki kesamaan konsep dan tema. Hasil penelitian terdahulu yang berasal dari lingkungan Kemenkominfo yang dianggap relevan dengan penelitian ini, yaitu: pertama, penelitian dengan judul “Pengembangan TIK Sebagai Jaringan Komunikasi di Jabar dan Banten” ditulis oleh Sumarsono dan tim Peneliti pada BPPKI Bandung, pada tahun 2009. kedua, “E-Government Sebagai Media Informasi dan Komunikasi Dalam Perspektif Keterbukaan Informasi Publik” ditulis oleh R.M Agung Harimurti, peneliti dari BPPKI

Yogyakarta, tahun 2010.

Sebagai gambaran dari penelitian terdahulu, di bawah ini disajikan dalam

sebuah tabel tentang perbedaan-perbedaan dengan Penelitian Pengembangan TIK dalam Mewujudkan JCP pada Pemerintah Kota Sukabumi.

Tabel 1
Perbedaan Penelitian tentang Pengembangan TIK dalam Mewujudkan Jabar Cyber Province pada Pemkot Sukabumi dengan Penelitian Terdahulu

Deskripsi Penelitian	Pengembangan TIK sebagai Jaringan Komunikasi di Jabar dan Banten	Judul Penelitian <i>e-Government</i> sebagai Media Informasi dalam Perspektif Keterbukaan Informasi Publik	Pengembangan TIK dalam Mewujudkan Jabar Cyber Province pada Pemkot Sukabumi
Pendekatan penelitian	Pendekatan kuantitatif	Kualitatif, di mana <i>website</i> sebagai <i>supply research design</i> .	Pendekatan kualitatif
Fokus Penelitian	Pengembangan TIK sebagai <i>enabler</i> ke dalam <i>political action</i> dan <i>lead action</i> .	<i>e-government</i> pada tiga pemerintah daerah sebagai media pemerintahan yang transparan.	Pengembangan TIK, JCP sebagai media komunikasi pada Pemkot Sukabumi.
Tujuan penelitian	Infrastruktur dan integrasi jaringan komunikasi antar pemerintah daerah	Untuk menilai tampilan <i>website</i> dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan.	Mengetahui kebijakan pengembangan, dalam mengaplikasikan JCP sebagai media informasi dan komunikasi.
Teknik pengumpulan data	Penelitian survei, populasi adalah perangkat Pemprov Jabar dan Banten, yang meliputi jaringan komunikasi vertikal dan horizontal.	Penelusuran <i>website</i> yang ditetapkan sebagai objek, observasi, selanjutnya kategorisasi dengan alat analisis deskripsi	Wawancara mendalam terhadap informan kunci yang terdiri dari para pejabat di lingkungan Kantor Kominfo Pemkot Sukabumi, kantor kecamatan, dan nara sumber dibidang TIK

Sumber: komparasi dengan hasil penelitian dari Sumarsono 2009 dan Harimurti 2010.

Pengembangan TIK di Pemkot Sukabumi dalam Mewujudkan JCP.

Dinas yang berkompeten dalam pengembangan TIK di Kota Sukabumi adalah Kantor Informasi dan Komunikasi (Infokom), PDE, dan Arsip Daerah, dengan visi: terwujudnya informasi yang cepat, tepat, akurat, dan terpercaya dalam memfasilitasi masyarakat pengguna informasi dan komunikasi. Dengan kepemilikan *Website* www.sukabumi.go.id, *e-government* Kota Sukabumi telah mendapat penghargaan ICT

Pura Tingkat Madya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai pengelola terbaik di Indonesia pada tahun 2012 lalu, bahkan Kota Sukabumi sekarang ini dijadikan sebagai *pilot project* pembangunan infrastruktur *Jabar Cyber Province* (JCP) dan *Jabar Zone*, diharapkan kebutuhan data dan informasi yang akurat dapat dicapai serta dimanfaatkan lebih optimal oleh kalangan pemerintah, dunia pendidikan, *stakeholder*, serta masyarakat luas.

Dengan konsep JCP dan *Jabar Zone*

akan memberikan kemudahan akses layanan data dan informasi kepada masyarakat luas, sehingga diharapkan dapat menaikkan IPM Kota Sukabumi dan Jawa Barat. Dalam bidang pendidikan pula, dengan mengadopsi konsep *cyber city*, Kota Sukabumi juga meningkatkan dalam bidang pendidikan, di mana sekolah-sekolah yang ada di lingkungan Kota Sukabumi dapat melaksanakan proses belajar mengajar secara elektronik (*e-learning*).

Selain itu dengan telah dicanangkannya Kota Sukabumi sebagai kota vokasi yang menitikberatkan pada pola *link and match* antara dunia pendidikan terutama jenjang pendidikan SMK dengan dunia usaha/dunia industri dalam rangka membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang siap berkompetisi di berbagai sektor perekonomian baik lokal, regional, nasional, bahkan internasional.

Melalui program pemberdayaan informasi dan komunikasi dengan didukung personil, sarana dan prasarana serta dana yang cukup memadai diharapkan Kantor Infokom, PDE, dan Arsip Daerah Kota Sukabumi menjadi organisasi yang dapat melaksanakan tupoksi organisasi dengan baik dan mampu memenuhi harapan semua pihak sebagai organisasi pemerintahan daerah yang dinamis, efektif, efisien, produktif, kolaboratif, akomodatif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good and responsibility governance*), sehingga diperoleh pelayanan prima untuk masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kewenangan, tugas pokok, dan fungsi Kantor Infokom, PDE, dan Arsip Daerah Kota Sukabumi telah menetapkan rencana, strategi, tujuan, dan sasaran utama kegiatan sesuai dengan Peraturan Walikota Sukabumi No. 50 Tahun 2012, yakni: memfasilitasi manajemen pemerintah daerah yang transparan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan Kota Sukabumi sehingga akuntabilitas publik senantiasa terjaga dan terpelihara.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi 2008-2013 berdasarkan Perda No. 8 tahun 2008, adalah kebijakan untuk mendorong

perkembangan *e-government* di kota Sukabumi yang difasilitasi oleh pemerintah kota, yaitu menciptakan manajemen pemerintahan yang didasarkan pada data yang akurat dan terkini.

Konsep *cyber city* yang sudah dicanangkan oleh Pemkot Sukabumi, diharapkan akan terhubungnya semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi dalam satu jaringan komunikasi/intranet (LAN dan WAN), terbukanya komunikasi pemerintah kota dengan masyarakat luas melalui media TIK, serta menyebarnya informasi pembangunan kepada masyarakat luas dengan melalui media TIK, tanpa ruang batas dan waktu. Kondisi eksisting perkembangan *e-government* di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi dilaksanakan oleh Kantor Kominfo, di mana pembangunan *e-government* baru sampai tahap I, yaitu menerbitkan data dan informasi tentang diri sendiri bagi kepentingan warga (*via website*) dan juga menyediakan fasilitas komunikasi dua arah sebagai *internally networked public-service provider*.

***E-Government* dan Transparansi Informasi**

Pemanfaatan TIK dalam proses pemerintahan yang secara implementatif diwujudkan dalam *e-government* merupakan pilihan yang tepat guna mewujudkan transparansi informasi bagi masyarakat (Dwiyanto, 2005). Masyarakat sebagai pengguna dapat dimudahkan secara efektif dan efisien eksistensi terhadap pelayanan informasi yang berasal dari portal pemerintah.

Visi *e-government* dilandasi pada empat prinsip dasar, yaitu (1) Memberikan perhatian penuh pada jenis-jenis pelayanan publik, dengan prioritas: memiliki volume transaksi yang besar dan melibatkan banyak sekali sumber daya manusia, membutuhkan interaksi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat, memungkinkan terjadinya kerja sama pemerintah dengan swasta maupun LSM dan Perguruan Tinggi; (2) membangun lingkungan yang kompetitif, di mana sektor swasta dapat berperan dalam hal pelayanan publik (Muhajir, 2005).

Sementara itu struktur informasi diperlukan untuk memperjelas informasi yang akan disampaikan dalam portal, terutama situs internet. Struktur informasi yang tercakup dalam situs internet adalah prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi dan akuntabilitas (Winarno, 2004). Transparansi diperlukan agar aksi oleh satu pihak dapat dikontrol oleh pihak lainnya, dan akuntabilitas merupakan konsekuensi yang harus ada agar transparansi tersebut menjadi bermakna.

Penerapan prinsip *e-government* tersebut dimaksudkan untuk mempercepat proses komunikasi dan informasi antara pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dengan masyarakat di mana pemanfaatan TIK ditujukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menghidupkan aktivitas masyarakat guna mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik, serta berfungsi menjadi portal informasi, interaksi, dan transaksi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pihak pemangku kepentingan. Portal tersebut menggambarkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam kerangka pelayanan publik (Indrajit, 2004).

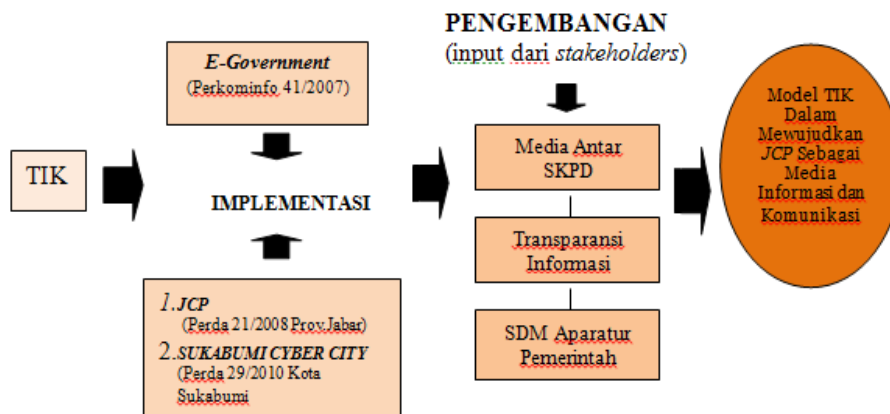
Membangun JCP yang terhubung dengan fasilitas TIK atau *e-government* di Provinsi Jabar merupakan momen yang tepat dalam mengimplementasikan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi secara baik dan efisien agar bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Keberadaan Undang-Undang KIP juga akan menjadi bagian penting dari solusi bagi penyelenggaraan pemerintahan. Sebagaimana dikemukakan *United Nation* "Centre for Good Governance", kebebasan memperoleh informasi dan menyampaikan aspirasi adalah hak asasi manusia yang mendasar dan universal, di mana setiap orang memiliki hak untuk memperoleh informasi, dan sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk membuka informasi dan komunikasi serta memberikan kemudahan untuk mengaksesnya mengenai penanggulangan pemerintahan (Harimurti, 2007).

***E-Government* sebagai Media Komunikasi dan Informasi**

Penerapan *e-government* dalam menunjang *good governance* seperti, transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas dimaksudkan untuk mempercepat proses komunikasi dan informasi antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan masyarakat, di mana pemanfaatan TIK ditujukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik (Indrajit, 2004). Ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan agar menarik pengguna mau mengakses secara berkelanjutan, informasi apa yang paling dibutuhkan, di mana informasi terbagi dua, yaitu jenis informasi dan jenis data. Jenis informasi adalah informasi yang disajikan berhubungan dengan sumber daya pelayanan publik, seperti pelayanan umum, potensi, dan peluang investasi, komoditi perdagangan, infrastruktur pendukung, akomodasi, dan sebagainya. Jenis data adalah bentuk informasi yang disajikan dalam portal, baik berupa teks, gambar, maupun peta, sedangkan proses komunikasi, yaitu tersedianya media untuk berinteraksi antara pengunjung dengan pemerintah secara *online*, baik berupa *email*, kontak pengunjung atau forum diskusi *online* (Herman, 2009).

Selanjutnya, Bank Dunia dalam laporannya mengenai "Governance and Development" mengartikan *good governance*, sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggungjawab pada publiknya. Salah satu kunci dari *governance* adalah jaringan, seperti yang dijelaskan oleh Frederickson "The world is probably the best and most generally accepted metaphor for describing the patterns of interactions of multiple organizational systems or networks". *Good governance* dikatakan berhasil apabila otoritas terdesentralisasi pada pusat-pusat kekuasaan yang banyak, yang satu dengan lainnya saling mengontrol (Rossano, 2004).

Berdasarkan pada kerangka teori yang dipaparkan sebelumnya, maka dapat digambarkan dalam sebuah diagram tentang paradigma penelitian seperti di bawah ini:



Gambar 1
Paradigma Penelitian

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara mendalam, tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide (Sugiyono, 2007). Data yang diperoleh melalui observasi adalah dari situs/*website* www.sukabumikota.go.id, sebagai induk dari portal-portal pemerintah yang ada di Kota Sukabumi.

Lokasi penelitian berada di Pemerintah Kota Sukabumi pada Kantor PDE, Arsip Daerah dan Humas, dan Bagian Pengelola situs/*website* www.sukabumikota.go.id, serta beberapa kantor kecamatan dan kelurahan. Adapun Kota Sukabumi dijadikan area penelitian, karena sistem pengelolaan di bidang TIK lebih maju dari daerah lainnya di Jawa Barat, terbukti kota ini termasuk 27 kota dan kabupaten dari 168 daerah di Indonesia telah meraih penghargaan *Information, Communication and Technology (ICT) Pura Tahun 2012* tingkatan Madya, yang diserahkan langsung oleh Sekjen Kemenkominfo Dr. Basuki Yusuf Iskandar tanggal 18 Oktober 2012 lalu. Sehingga dengan demikian daerah ini bisa menjadi acuan bagi pengembangan *e-government* di Jawa Barat. Penentuan informan dilakukan

secara purposif.

Wawancara dilakukan dengan Kepala Dinas Kominfo beserta pejabat strukturalnya, beberapa Kepala SKPD beserta pejabat struktural yang berkompeten dengan TIK, camat dan lurah, serta pihak lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengembangan TIK pada Pemerintah Kota Sukabumi.

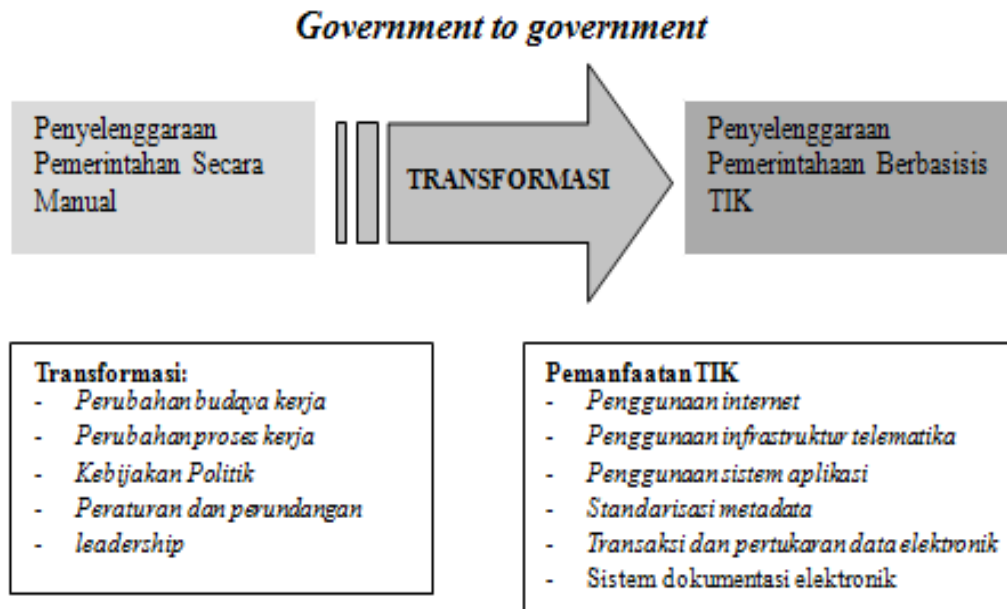
Program JCP memanfaatkan teknologi internet sebagai media informasi dan komunikasi dalam menjalankan aktivitas pemerintahan di setiap kabupaten dan kota, bahkan pada kantor kecamatan dan kelurahan di seluruh Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kota Sukabumi yang awalnya mengandalkan sistem jaringan (LAN) yang sebatas masing-masing dinas/kantor, sekarang sudah mulai mengembangkan sistem internet untuk bisa menghubungkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) secara terintegrasi.

Meskipun sudah mendapat penghargaan ICT Pura Tingkat Madya dari Kementerian Kominfo tahun 2012 lalu, Kota Sukabumi dengan pemilikan *website* www.sukabumi.go.id, belum merasa puas dengan kondisi TIK yang ada, dan terus berbenah dengan menambah beberapa sub domain selain sub-sub domain yang telah ada sebelumnya, seperti sub domain dari dinas

pertanian dengan pusat informasi pasarnya, Dinas Perdagangan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan.

Dengan transformasi penyelenggaraan pemerintahan yang bermula dari manual menuju yang berbasis TIK, maka terjadi

perubahan dalam budaya kerja, proses kerja, yang seluruhnya dapat dimanfaatkan melalui penggunaan internet, sistem aplikasi, serta dengan pertukaran data secara elektronik. Sebagaimana dalam gambar diterangkan sebagai berikut.



Sumber: Kantor Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi.

Gambar 2
Transformasi Pemanfaatan TIK

Pengembangan TIK di Pemkot Sukabumi dalam mewujudkan JCP sebagai media komunikasi dan informasi dilakukan melalui konsep Sukabumi *cyber city*, yakni: terhubungnya semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi dalam satu jaringan komunikasi/internet (LAN dan WAN), serta terjadinya komunikasi (teks, audio, visual) antarSKPD di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi, sehingga fungsi pengawasan lebih mudah dilakukan, tanpa melalui hubungan fisik yang selama ini sering dilakukan. Hubungan (*relationship*) antarpengambil keputusan akan lebih mudah dilakukan, karena pemanfaatan TIK dalam perubahan proses kerja dan budaya kerja diperlakukan sebagai bagian yang utuh dalam pemerintahan, dan harapan untuk menuju pemerintah yang baik (*good governance*) berbasis informasi dapat tercapai. Dari sisi komunikasi dan informasi organisasi, konsep

pengembangan jaringan internet akan memudahkan proses pengorganisasian sesuai prinsip pembagian kerja, sehingga kebutuhan informasi bagi masyarakat dan pemerintah saling berhubungan dan dapat dikerjakan secara bersama dalam memberikan pelayanan publik. Proses komunikasi *online* antarpimpinan di Pemkot Sukabumi akan terjalin secara baik, apakah dengan *level* di atas maupun dengan *level* di bawah.

Kepala Kantor Komunikasi dan Informatika Kota Sukabumi, sebagai pengelola sarana teknologi informasi dan komunikasi, menyatakan:

“Transformasi menuju penyelenggaraan berbasis TIK, yang awalnya dilakukan secara manual, sekarang diupayakan dengan pemanfaatan internet, penggunaan infrastruktur telematika, penggunaan sistem aplikasi, sistem dokumentasi elektronik, serta standarisasi perubahan budaya kerja lainnya. Di antaranya pemerintah menyediakan sarana

TIK agar dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di setiap lingkungan pemerintah, serta memberikan informasi kepada masyarakat yang sangat mudah diakses baik di dalam maupun di luar negeri” (Wawancara dengan Ir. H. Cecep Mansyur, MM., tanggal 15 April 2013, di ruang kerjanya).

Program JCP yang dicanangkan Pemprov Jabar sejak tahun 2008 hingga sekarang, koneksi jaringan berkembang pesat sampai kepada organisasi pemerintahan kecamatan bahkan pada kelurahan. Skala prioritas informasi yang disajikan kepada masyarakat oleh Kantor Komunikasi dan Informatika. Peraturan Walikota Sukabumi No. 30 Tahun 2008, dengan konsep *cyber city* telah menerbitkan data dan informasi tentang potensi kewilayahan serta informasi dari berbagai bidang pemerintahan yang datanya *diupdate* masing-masing SKPD.

Hubungan kerjasama antara kantor Kominfo dengan SKPD sinergitasnya ditingkatkan dalam suatu infrastruktur jaringan yang terpadu, yakni dengan menyediakan fasilitas komunikasi dua arah (*e-government* dikembangkan sebagai *internally networked public-service provider*). Komunikasi dengan SKPD dalam menyajikan konten informasi dan data aktual dilakukan oleh para pejabat yang berkompoten di setiap SKPD, sehingga informasi yang disajikan bidangnya lebih luas, tidak sebatas potensi kewilayahan Kota Sukabumi. Proses *updating* yang dilakukan akan selalu terjadi pada setiap saat sesuai dengan dinamika informasi di masyarakat. Dengan demikian, konsep *e-government* dengan melakukan ekspansi jaringan dan konten sesuai dengan program JCP Pemprov Jabar, yakni: (1) Terbukanya komunikasi pemerintah Kota Sukabumi dengan masyarakat luas melalui pengembangan TIK; (2) Menyebarnya informasi pembangunan kepada masyarakat luas dengan melalui media TIK, tanpa ruang batas dan waktu; (3) Memberikan layanan akses internet kepada masyarakat luas dengan data informasi yang aktual.

Dengan konsep tersebut, fungsi komunikasi interaktif di antara SKPD Kota Sukabumi dilakukan secara komprehensif dan

kontinyu, yakni dapat menyatukan kesamaan persepsi, komitmen, rasa memiliki, dan tanggungjawab terhadap pengelolaan jaringan internet.

Pola komunikasi antarorganisasi seperti itu penting dilakukan, dalam rangka saling mendukung terhadap komitmen yang dibuat, membangun kepercayaan, membangun keterbukaan dan transparansi, serta dapat mengomunikasikan tujuan kinerja masing-masing lembaga dalam satu jaringan internet. Apalagi disaat sekarang ini fungsi koordinasi dan komunikasi antarsatuan kerja sangat dibutuhkan dalam rangka menyatukan sikap dan pandangan terhadap strategi pembangunan daerah secara berkelanjutan, sehingga konsep yang direncanakan bisa dilakukan secara terpadu dan terintegratif. Sifat ego dan cara berfikir parsial dari masing-masing kesatuan dapat diminimalkan dengan keberadaan TIK, bahkan pejabat di atasnya setingkat bupati, walikota, dan gubernur dapat mengawasi pelaksanaan pembangunan secara *online*.

Latar belakang kondisi geografis maupun birokratis Kota Sukabumi memerlukan aktivitas komunikasi dan informasi yang berbasis digital, karena akan semakin canggih sekaligus murah dan mudah, dan bagi masyarakat bisa mengakses selama 24 jam tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, serta frekuensi pertemuan secara fisik semakin menurun. Prinsip koordinasi antarSKPD yang selama ini kurang terbina, dengan sistem jaringan terpadu secara *online* bisa meningkat, apalagi di *backup* oleh bantuan Pemprov Jabar yang telah memfasilitasi PC di setiap kecamatan bahkan kelurahan.

Kasi TIK dan Aptel serta Kasi Pusat Data Elektronik (PDE) dan Postel pada Kantor Kominfo Kota Sukabumi, mengatakan:

“Sinergitas dengan jaringan terpadu maka kesiapan dalam memberikan fasilitas informasi dan komunikasi kepada masyarakat akan mampu meningkatkan pelayanan yang *easier*, *cheap*, dan *faster*; begitu pula pada sumber daya aparatur sebagai pengelola *e-government* akan lebih matang dan *qualified* untuk menghadapi tantangan demokratis dan

globalisasi melalui pemanfaatan TIK dalam suatu *e-literacy* yang baik, baik penguasaan *e-government*, *e-procurement*, *e-budgetting*, *e-controlling*, *e-bussiness*, dan *cyber law* yang perlu dikuasai oleh setiap aparat pemerintahan” (Wawancara dengan Rakhman Garna Kusumah ST., MT. dan Riksan Satya Prawira, SS., tanggal 16 April 2013, di ruang kerjanya).

Untuk meningkatkan hubungan komunikasi dan informasi melalui jaringan internet Kasi PDE dan Postel mengatakan:

“Dengan meningkatkan infrastruktur TIK sebagai syarat utama dalam mendukung jaringan komunikasi antarSKPD, yakni dengan meningkatkan keberadaan *internet service provider* (ISP), *local area network*, *web hosting*, serta meningkatkan *bandwidth* (Wawancara dengan Riskan Satya Prawira, SS, tanggal 16 April 2013, di ruang kerjanya).

Hal ini dilatarbelakangi oleh masalah infrastruktur telekomunikasi Indonesia yang memang masih belum tersebar secara merata, walaupun semua fasilitas ada, harganya masih relatif mahal. Pemerintah juga belum menyiapkan pendanaan (*budget*) yang memadai untuk semua keperluan ini, secara umum harga *bandwidth* internet masih cukup mahal dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, sehingga dalam pemanfaatan internet di Kota Sukabumi masih memerlukan dana yang besar sebagai dana operasionalnya.

Sebagai pengembangan awal yang dilakukan sejak tahun 2000, Pemkot Sukabumi telah mengurangi kerjasama dengan pihak ketiga atau pihak luar sebagai pihak yang bekerjasama, selanjutnya dengan sistem pendampingan, maka sekarang Pemkot Sukabumi mengelola sendiri secara mandiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari segi kemampuan atau pengelolaan TIK sumber daya aparat sudah ada peningkatan dan tidak menggantungkan pada orang lain, baik dari sisi *hardware/software* maupun konten informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa dari sisi kemampuan untuk mengelola sendiri pada kantor Komunikasi dan Informasi sebagai koordinator *website* antarSKPD di pemerintahan kota, serta koordinasi dengan Pemprov Jabar yang memunyai program JCP, merupakan terobosan transformasi yang

positif. Apalagi dalam pengembangan TIK di Kota Sukabumi ditunjang dengan dana yang memadai, meskipun sumber daya aparat perlu ditingkatkan lagi.

Untuk memanfaatkan jaringan komunikasi dalam menunjang pelaksanaan TIK, pengoperasian jaringan komunikasi antarSKPD serta 7 (tujuh) kecamatan serta beberapa kelurahan sudah menyediakan sub domain atau *web hosting* pada *websitenya*, yakni tempat untuk berkomunikasi dan informasi serta menampilkan data-data yang diperlukan oleh instansi lain atau oleh masyarakat. Koneksi ini dapat digunakan secara nonstop (*dedicated connection*) dengan bermacam akses internet. Kapasitas *web* yang disediakan juga ditingkatkan sampai penggunaan 2 GB, tapi dalam pemanfaatannya berkisar antara 50 Kbps sampai 50 MB.

Berdasar pada kapasitas yang dimiliki oleh kantor Kominfo Sukabumi dalam pengelolaan jaringan TIK dinilai cukup baik untuk sebuah pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi antarSKPD bahkan untuk beberapa kecamatan yang memunyai sub *domain*. Di samping itu, keberadaan akses internet yang terbatas dan tempat akses informasi yang jumlahnya juga terbatas, pemerintah dengan bantuan masyarakat bergotong royong menciptakan *access point* yang terjangkau. Untuk menjaga eksistensinya, maka perlu biaya *maintenance*, bahkan keberadaannya di tempat strategis yang mudah dijangkau masyarakat.

Kebijakan Pengembangan JCP dalam Rangka Meningkatkan Transparansi Informasi dan Komunikasi.

Pengembangan transparansi informasi dan komunikasi kepada masyarakat melalui pemanfaatan *e-government*, pemerintah Kota Sukabumi telah melakukan *transfer* informasi antarSKPD termasuk pada kantor kecamatan dan kelurahan, sehingga masyarakat dapat mengakses secara langsung berbagai bidang yang dibutuhkan. Meskipun saat ini baru terhubung dengan 8 kelurahan dari 33 kelurahan yang ada, dan direncanakan dari tahun ke tahun sampai tahun 2014

semuanya akan terkoneksi. Dengan aspek transparansi informasi tersebut, akan terwujud pemerintahan yang baik, yang memenuhi kriteria *competence*, *transparency*, dan *accountability*.

Keberadaan dan keunggulan jaringan internet melalui *website* dapat memfasilitasi pemenuhan hak warga untuk memperoleh informasi dan komunikasi yang dibutuhkan tentang penyelenggaraan pemerintahan, tanpa adanya sekat birokrasi yang selama ini melekat pada aparatur pemerintahan. Dengan sistem informasi yang transparan dan akuntabel, memberikan input yang berharga bagi pemerintah. *Website* dapat dimanfaatkan untuk menyediakan informasi mengenai berbagai aktivitas pemerintah yang akan, sedang, maupun telah dilakukan dan menyediakan fasilitas untuk melakukan sesuatu, seperti berpartisipasi menyampaikan aspirasi dan mengakses layanan.

Berdasarkan pada Peraturan Walikota Sukabumi No. 30 Tahun 2008, tentang Konsep *Cyber City*, pengembangan aktivitas informasi diserahkan kepada kantor Kominfo sebagai pusat penyedia data, di mana setiap satuan kerja diharuskan memosting informasi pada fasilitas sub *domain website* yang ada. Fasilitas lain yang memungkinkan kondisi eksisting sarana *e-government* oleh masyarakat adalah meningkatkan aksesibilitas terhadap situs resmi pemerintah Kota Sukabumi, dengan alamat www.sukabumikota.go.id.

Menurut kepala kantor Kominfo Sukabumi:

“Pengembangan transparansi atau keterbukaan informasi yang sudah dikembangkan saat ini adalah: (1) Mengembangkan sistem pelayanan informasi melalui TIK agar lebih terjangkau masyarakat luas, tidak hanya bagi masyarakat kota Sukabumi saja; (2) Penataan sistem manajemen dan proses kerja dengan pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat secara terpadu; (3) Pemanfaatan TIK secara optimal; (4) Pengembangan sumber daya manusia di pemerintah Kota Sukabumi dan peningkatan *e-literacy* masyarakat” (Wawancara dengan Ir. H. Cecep Mansyur,

MM., tanggal 16 April 2013, di ruang kerjanya).

Dengan keempat pengembangan tersebut, kerja sama dengan instansi lain akan mudah dilakukan secara *online* yang terbuka, seperti kerja sama melalui Sistem Informasi Administrasi Perkantoran (SIAP), Pusat Informasi Pasar (PIP) yang terdiri dari: sistem informasi pendidikan, sistem informasi kesehatan dan sistem informasi pertanian, serta sistem informasi perdagangan, yang semua itu berkolaborasi dengan dinas atau SKPD yang berkompeten. Sedangkan SKPD lainnya yang bersifat aplikatif, *website* kantor Kominfo *membackup* informasi dan data yang *diposting* melalui jaringan koneksi internet maupun melalui jemput bola. Pengembangan sistem informasi yang dikembangkan saat ini, konten lebih lengkap dan variatif, sehingga masyarakat pengguna relatif mudah dalam mengakses informasi yang dibutuhkan.

Berdasarkan aspek transparansi informasi yang disediakan, proses *posting* informasi yang diterima umumnya melalui *screening* oleh para pejabat di SKPD, dengan tujuan agar informasi yang disajikan lebih tertib, sehingga tidak terjadi miskomunikasi dan interpretasi dari masyarakat hal-hal yang dapat merugi. Dengan proses *screening* alur informasi yang akan diterima oleh pengguna/masyarakat akan lebih akomodatif dan lengkap, sebab beberapa konten informasi ada transformasi positif dari pembuat kebijakan. Kelemahan dari cara seperti itu adalah esensi keterbukaan informasi/publik, kurang memenuhi semua unsur-unsur transparansi informasi, karena hal-hal yang menyangkut aktivitas kantor yang lebih teknis serta yang lebih sensitif cenderung tidak *diupload* kepada masyarakat, terutama yang bersinggungan dengan masalah yang dianggap sensitif diberitakan, seperti laporan penggunaan anggaran oleh setiap SKPD. Menurut esensi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa setiap badan publik harus mengumumkan secara berkala (kinerja, penggunaan anggaran), diumumkan secara serta merta (kepentingan publik), tersedia setiap saat (pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa,

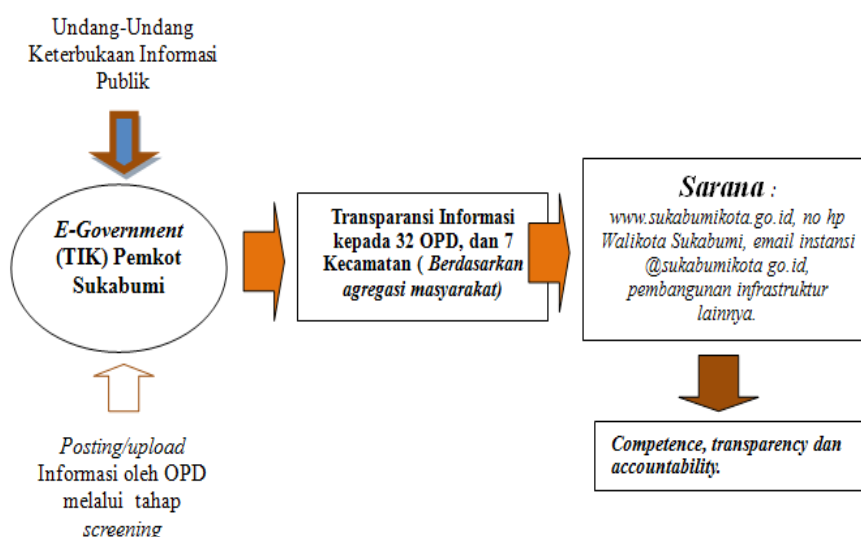
pengawasan dan perjanjian dengan pihak ketiga, dan pelayanan akses informasi) kepada masyarakat luas yang membutuhkan.

Alternatif pemanfaatan *website* di lingkungan pemerintah Kota Sukabumi tidak terbatas pada *website* yang dimiliki oleh kantor Kominfo sebagai pembina dan *pilot project* bagi SKPD lainnya, tetapi sistem informasi aplikatif lainnya yang akan mudah diakses masyarakat.

Aspek pemanfaatan oleh masyarakat umum serta dalam menunjang keterbukaan informasi publik, Pemkot Sukabumi telah memberikan sarana komunikasi dan informasi yang lengkap kepada masyarakat, apabila ada hal-hal yang perlu diketahui lebih lanjut dari *website* pemerintah yakni: (1) Memberikan layanan informasi dan komunikasi secara lengkap dengan alamat www.sukabumikota.go.id, di mana masyarakat dapat berkomunikasi secara interaktif dengan para pejabat yang berkompeten; (2) Memberikan nomor *handphone* Walikota Sukabumi dengan nomor 081563200200 maupun akun media sosial yang dimiliki; (3) *Email* instansi

@sukabumikota.go.id, serta; (3) Membangun infrastruktur yang tergabung dalam jaringan *local area network* dan *wide area network*, di mana sampai tahun 2013 telah mencapai 94% dari perangkat SKPD dan kantor kecamatan, dan hanya satu SKPD dan beberapa kecamatan saja yang belum terbangun infrastrukturnya.

Pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi, pemerintah Kota Sukabumi selalu meningkatkan layanan *online* kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi, yakni dengan menyediakan koneksi internet 24 jam, meningkatkan kapasitas *bandwidth*nya menjadi 4,5 MBps serta menambah jaringan *accesspoint (hotspot)*, serta koneksi antarOrganisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Sukabumi, yaitu 32 OPD dan 7 kecamatan (dengan 200 komputer), disertai dengan pemberian akses internet. Sistem pengembangan informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Pemkot Sukabumi menuju transparansi informasi tersebut, maka dapat digambarkan dalam bentuk skema di bawah ini:



Gambar 3
Pengembangan TIK dalam Meningkatkan Transparansi Informasi dan Komunikasi

Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah dalam Mendukung JCP

Program JCP yang diimplementasikan

dengan kegiatan *cyber city* di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi bermanfaat dalam memberikan pelayanan data dan informasi yang lebih cepat kepada pengambil kebijakan, antarSKPD, *stakeholder* dan juga

kepada masyarakat luas. Untuk itu skala prioritas peningkatan sumber daya aparat di bidang TIK baik dari sisi kualitas dan kuantitas lebih di kedepankan, sebab dari 25 aparat PNS dan dibantu oleh 5 tenaga honorer pada Kantor Kominfo Kota Sukabumi dinilai masih kurang memadai.

Terbatasnya SDM yang andal dalam mengembangkan TIK merupakan hal yang dihadapi oleh setiap pemerintahan, karena TIK merupakan bidang yang sangat pesat perkembangannya, bahkan dunia teknologi informasi terlalu cepat berubah dan berkembang, sementara sebagian besar sumber daya manusia aparat yang ada di pemerintahan cenderung kurang memiliki motivasi untuk terus belajar mengejar kemajuan teknologi tersebut dan cenderung menjadi lambat dalam menyelesaikan aktivitas kantor.

Menurut Kepala Kantor Kominfo Kota Sukabumi, sepakat bahwa di samping masalah kemampuan atau penguasaan aparat di bidang *software* dan *hardware*, hal yang dihadapi dalam merealisasikan *cyber city* adalah kinerja aparat dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan efektif masih kurang, seperti prinsip berbagi masih kurang (*sharing*), di mana informasi dan komunikasi untuk mempermudah urusan belum merasuk di lingkungan SKPD Pemkot Sukabumi dan umumnya di Indonesia, bahkan ada pameo yang mengatakan, apabila bisa dipersulit mengapa dipermudah. Konsekuensinya banyak oknum yang menggunakan kesempatan dengan mempersulit mendapatkan informasi (Wawancara dengan Ir. H. Cecep Mansyur, MM., tanggal 17 April 2013, di ruang kerjanya).

Menurut Kasi IT dan Aptel serta Kasi PDE dan Postel, sepakat bahwa kesulitan besar yang dihadapi para pegawai dalam aktivitas kerja adalah "Kurang nya kebiasaan mendokumentasikan (apa saja) aktivitas kantor yang dianggap penting untuk diketahui masyarakat, sehingga bila diperlukan lagi *file* nya tidak lengkap". Padahal kemampuan untuk mendokumentasi merupakan bagian dari ISO 9000 dan juga menjadi bagian dari

standar *software engineering*. Dari permasalahan yang dihadapi oleh Pemkot Sukabumi, menunjukkan para aparat perlu pembinaan dan pendidikan di bidang teknologi informasi agar dapat mengimplementasikan konsep *cyber city*. Karena bila tidak segera dibenahi dengan segera, maka kekurangan kemampuan pemerintah ini sering dimanfaatkan oleh pihak lain atau oknum bisnis dengan menjual solusi yang salah dan mahal. Konsekuensinya *budget* yang diperlukan dalam pengembangan TIK akan lebih besar, serta kemandiriannya belum bisa diandalkan.

Pendidikan CIO bagi pemerintah Kota Sukabumi dan daerah lainnya, merupakan salah satu cara yang strategis dalam menghadapi dinamika perkembangan TIK yang semakin canggih, sehingga bagi aparat pemerintah mampu mengimbangnya. Secara *empirik ability* pengelolaan organisasi pemerintah perlu menyesuaikan dengan pola pengakomodasian perkembangan TIK. Gagasan pendidikan CIO yang digagas oleh Kementerian Kominfo merupakan salah satu cara meningkatkan SDM aparat sebagai *enterprise leadership* yang menyakup kebutuhan dalam suatu jabatan maupun kemampuan dalam bidang TIK. Sebagaimana dirumuskan Magister Teknik Informasi (MTI) UGM, bahwa: CIO sebagai penyusun strategi TIK yang bisa melahirkan transformasi relasi antara pemerintah dengan masyarakat, dunia usaha dan sesama lembaga pemerintah dalam suatu jaringan atau koneksi yang integratif, penyelaras proses birokrasi di mana pengembangan TIK harus berjalan seiring dengan birokrasi yang ada, serta dengan pendidikan tersebut memberikan solusi dan dapat mendefinisikan tujuan dan sasaran yang akan diimplementasikan strategi pengembangan dan operasionalnya (Darono, 2011).

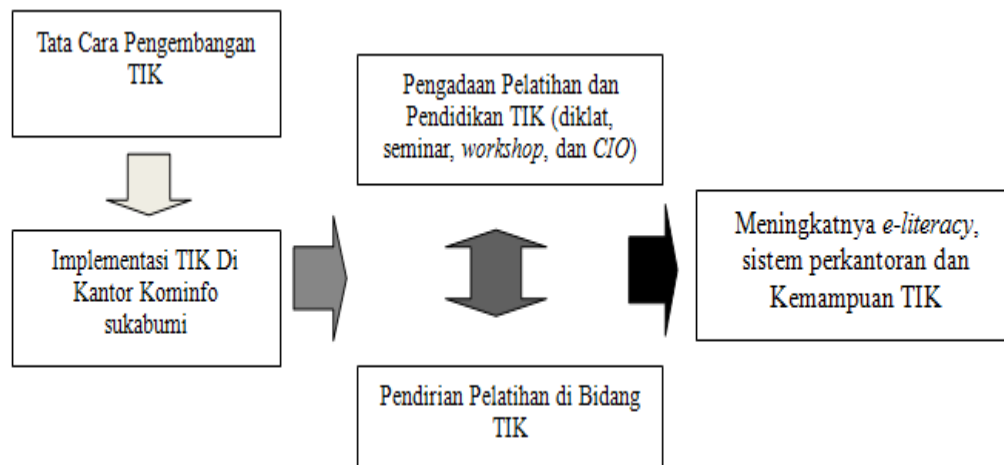
Peran dan fungsi aparat dalam aktivitasnya, diharap akan tercapai tiga hal berikut: (1) Meningkatnya keterampilan para pegawai di lingkungan Pemkot Sukabumi di bidang TIK; (2) Terselenggaranya program-program pelatihan, pendidikan, dan penelitian TIK, baik secara sistem pengelolaan kantor maupun teknis; (3) Meningkatnya

pembudayaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan TIK, seperti dalam kultur berbagi (*sharing*) informasi serta kultur mendokumentasi sebagai bagian dari ISO 9000 dan standar *software engineering*.

Sistem pengembangan tersebut, juga dampaknya dalam aktivitas kantor akan memunyai para pegawai yang memiliki kemampuan yang cepat, mudah, murah bagi manajemen kantor, serta dalam pelayanan kepada masyarakat. Sistem ini memberikan pengetahuan dan informasi yang dapat membantu para pegawai di lingkungan Pemkot Sukabumi untuk melibatkan secara langsung dan sejumlah kesempatan, sehingga mampu meningkatkan sistem koneksitas jaringan antarSKPD. Proses *knowledge*

sharing sangat bergantung pada peran aktif dari berbagai dinas, karena hal ini bukan domain Kominfo saja untuk menghasilkan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan masyarakat.

Dengan dukungan TIK serta peran aktif berbagai *stakeholders* terkait memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat, maka untuk mewujudkan Kota Sukabumi sebagai *cyber city* sekaligus merupakan sarana untuk mempercepat proses pertukaran informasi antar pihak-pihak dalam proses pembangunan informasi. Berdasarkan pada sistem pengembangan SDM yang sedang dan akan dilakukan tersebut, dapat digambarkan dalam suatu bagan di bawah ini:



Gambar 4
Sistem Pengembangan SDM di Bidang TIK pada Pemkot Sukabumi

PENUTUP

Simpulan

Pengembangan TIK di Pemerintah Kota Sukabumi sebagai media komunikasi dan informasi dalam mempermudah fungsi pengawasan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan dengan konsep Sukabumi *cyber city*, namun implementasinya belum seluruh SKPD serta kantor kecamatan memanfaatkannya secara optimal, baik dalam memanfaatkan konten maupun dalam meningkatkan akses internet dan literasi masyarakat.

Aspek transparansi informasi dan komunikasi kepada masyarakat melalui

pemanfaatan *e-government* kurang memenuhi unsur keterbukaan informasi terutama yang bersinggungan dengan konten informasi yang lebih teknis, hal ini karena ada *screening* terlebih dahulu dari pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga konten berdasarkan *agregasi* kepentingan masyarakat dikecualikan.

Pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan dalam membentuk keahlian dan keterampilan TIK kepada sumber daya aparatur pemerintah dilakukan dengan *knowledge sharing*, sedangkan dalam meningkatkan kemampuan *enterprise leadership* dalam suatu kemampuan bidang TIK, para aparat diberi pendidikan ke jenjang

yang lebih tinggi, setingkat *Chief Information Officer* (CIO).

Saran

Proses pengembangan jaringan infrastruktur perlu dilakukan secara kontinyu dan komprehensif serta menyatukan kesamaan persepsi dalam suatu tanggung jawab terhadap komitmen yang dibuat antarSKPD, termasuk pada kantor kecamatan dan kelurahan, sehingga keberadaan *e-government* sebagai media komunikasi dan informasi bermanfaat bagi masyarakat.

Hendaknya seluruh pejabat yang memimpin SKPD berkomunikasi dan *sharing* informasi secara berkala dalam jaringan *online*, sehingga aspek informasi yang dibutuhkan masyarakat lebih *competence*, *transparan*, dan *accountabel*.

Sumber daya aparat yang ada perlu ditingkatkan lagi, baik dari aspek manajerial maupun kemampuan teknis di bidang TIK, serta dukungan dan komitmen pemerintah terhadap konsep *cyber city* dapat diselaraskan dengan program JCP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Dwiyanto, Agus, (Ed). (2005). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Harimurti, Agung. (2007). *E-Government: Upaya Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Studi Penerapan di Pemerintah Provinsi DIY. Kumpulan Karya Ilmiah Peneliti IX*. Jakarta: Badan litbang SDM.

.....(2009). *E-Government sebagai Media transparansi Pemerintahan dalam Perspektif Keterbukaan Informasi Publik. Dipresentasikan pada Temu Ilmiah Peneliti*. MMTC. Yogyakarta.

Herman, Asep Suyanto. (2009). *Step By Step Web Design: Theory and Practices*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Indrajit, Richardus Eko.(2004). *E-government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta:Andi Offset.

Muhajir, Darwin. (2005). *Good Governance dan Kebijakan Publik. Lokakarya Reformasi Birokrasi menuju Good Governance*. Jakarta.

Rossano, Diaz. (2004). *E-Government Dalam Pemasaran Wilayah, Magister Perencanaan Kota dan Daerah*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Sugiyono. (2007). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABET.

Sumarsono, dkk.(2007).*Pengembangan Jaringan Komunikasi Antar Wilayah*. Laporan penelitian BPPKI Wilayah III Bandung.

Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Jurnal:

Darono, Agung.(2011). *Chief Information Officer dalam Aktualisasi Manajemen Strategi, Jurnal BPPK vol 2 no. 3, hal.1-7.*

Peraturan:

Propeda. 2005. *Program Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat*.

Perda 25/2010 RPJMD Provinsi Jawa Barat, jo Perda 2/2009 RPJMD Provinsi Jawa Barat)

Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat 2008-2013.

Masterplan Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2009-2013.